BAB XI

SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
Paradigma baru metode Pembangunan Ekonomi

Oleh Dewi Triwahyuni

PENGERTIAN & PRINSIP-PRINSIP DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DEFINISI :

SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan kesimbangan diantara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial dan lingkungan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Istilah ini ditemukan tahun 1987
Oleh **World Commission on Environment and Development**
(Bruntland Commnission)

Dalam Buku "COMMON FUTURE"
Dikemukakan 2 konsep :

LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN

SD Mempunyai dua Konsep Kunci :

1. KEBUTUHAN, yakni kesadaran akan adanya kebutuhan para masyarakat miskin di negara berkembang.
2. KETERBATASAN, yaitu adanya keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

7 (tujuh) tujuan Penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan (Bruntland), yaitu :

1) Memikirkan kembali makna pembangunan
2) Merubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pada pembangunan daripada pertumbuhan
3) Memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air, dan sanitasi,
4) Menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu.
5) Mengkonservasi dan meningkatkan sumberdaya.

6) Merubah arah teknologi dan mengelola resiko
7) Memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN :

(1) PRINSIP LINGKUNGAN/EKOLOGI

1. Melindungi sistem penunjang kehidupan
2. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik
3. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem yang rusak.
4. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan

(2) PRINSIP SOSIO-POLITIK

- DARI HAMBATAN LINGKUNGAN/EKOLOGI:
  1. Mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia dibawah daya dukung biosfer
  2. Mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia: mengembangkan strategi atau metode untuk meminimalisir pemakaian energi dan material per unit kegiatan ekonomi, menurunkan emisi beracun, merahabilitasi yang rusak.
  3. Meyakinkan adanya kesamaan sosio-politik dan ekonomi dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan.

4. Menjadikan perhatian-perhatian lingkungan lebih langsung dan terus-menerus pada proses pembuatan keputusan secara politis.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
6. Menciptakan hubungan antara aktivitas politik dengan lingkungan hidup

- DARI KRITERIA SOSIO-POLITIK :
  1. Menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai
  2. Meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi
  3. Meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi
  4. Meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan (*equality*) dan keadilan sosial.

- Prinsip pembangunan berkelanjutan menurut UNCED (The United Nations Conference on Environment/1992) memuat prinsip-prinsip yang menekan, diantranya:

  - manusia sebagai pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan
  - Peran negara sangat menentukan bagi kelangsungan kehidupan.
  - Perempuan memiliki peran signifikan terhadap proses pembangunan berkelanjutan, bahkan menjadi penentu keberhasilan.
  - Partisipasi masyarakat.

EVALUASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN :

Hasil KKT Bumi (1992) dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga pada kenyataannya 10 tahun setelah itu tidak menunjukkan kemajuan di bidang pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari:

- Emisi karbon dioksida global naik diatas 9%
- Kawasan hutun yang nciut 2,2% sejak 1990
- Tidak kurang dari 27% terumbu karang rusakm 10 tahun yang lalu 10%
- Masyarakat miskin dunia makin banyak

- Kurang lebih 14.000 – 30.000 penduduk kawasan selatan mati setiap tahunnya akibat tertular melalui air.
- Anggaran bantuan luar negeri menciut (1992 = US $ 69 Milyar dan ditahun 2000 = US $ 53 Milyar)
- Beban utang negara berkembang naik 34 %

Kelemahan-kelemahan KTT 1992, Menurut M.Khor (2001), antara lain:

1) Negara maju (utara) tidak mampu membuat komitmen yang jelas menuju reformasi struktur ekonomi internasional, atau mempelopori dialog baru antara utara – selatan.

2) Negara-negara utara yang mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sehingga transfer teknologi dengan syarat lunak menjadi sulit dilakukan.

3) KTT Bumi mengabaikan pentingnya mengatur perusahaan MNC secara hukum agar bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan degradasi sosial yang ditimbulkan oleh praktek berlebihan.
4) Negara utara, sulit mengurangi gaya hidup dengan pola konsumsi energi berlebihan
5) Komitmen utara dan selatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rendah.